

# **FRAMING PEMBERITAAN KASUS DUGAAN KETIDAKNETRALAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MASA PEMILIHAN PRESIDEN DI KOMPAS.COM**

Yanti Trianita<sup>1</sup>, Adrian<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma<sup>1,2</sup>

yantitrianita@staff.gunadarma.ac.id<sup>1</sup>, [adriansoujiro93@gmail.com](mailto:adriansoujiro93@gmail.com)<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana *framing* atau pembingkaiian pemberitaan mengenai kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri dalam masa Pilpres 2019 yang ada di media Kompas.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma *konstruktivis*. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada tim redaksi Kompas.com, serta mengumpulkan dokumen berupa berita tentang kasus dugaan ketidaknetralan Polri dalam masa Pilpres 2019 yang diperoleh dari portal berita Kompas.com. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing* dengan pendekatan model Robert N. Entman. Teori yang digunakan yaitu teori konstruksi realitas sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com membingkai kasus ketidaknetralan Polri secara netral dan berimbang. Kompas.com membingkai kasus tersebut dengan cara menampilkan konfirmasi fakta yang ada di lapangan. Kompas.com menampilkan judul dan isi berita sesuai fakta yang ada, menyajikan pemberitaan berdasarkan konfirmasi pihak yang terkait dan tidak ada tendensi berlebih yang menyudutkan pihak Kepolisian. Kompas.com menjalankan fungsi media sebagai pengawas pemerintahan karena berani mengangkat masalah yang ada di Institusi Kepolisian.

**Kata Kunci :** *Framing*, Pemberitaan, Ketidaknetralan Polri, Pilpres

## **PENDAHULUAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menuai polemik setelah Institusi tersebut dihadapi dengan kasus dugaan ketidaknetralan dalam masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, hal tersebut terjadi karena tersebarnya tangkapan layar percakapan grup Polisi yang berisi perintah dari Kapolres untuk memenangkan pasangan Capres no urut 01, Joko Widodo – Ma'ruf Amin serta adanya pengakuan dari mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sulman Aziz yang menyatakan bahwa Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Budi Satria Wiguna telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

AKP Sulman menyatakan hal tersebut pada konferensi pers yang digelar di Jakarta, tepatnya di Kantor Hukum dan HAM Lokataru pada hari Minggu, 31 Maret 2019. AKP Sulman Aziz yang dalam konferensi pers itu didampingi oleh Hariz Azhar

membuat pernyataan bahwa ia beserta Kapolsek Garut lainnya telah diberi perintah Kapolres Garut, AKBP Budi Satria untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Namun, Kapolres Garut AKBP Budi Satria langsung membantah tuduhan AKP Sulman. AKBP Budi mengaku tidak pernah memberi instruksi kepada para Kapolsek di lingkungan Polres Garut untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 di Pemilu 2019 (Wismabrata, 2019).

Menurut pemberitaan Kompas.com, pada saat AKP Sulman menyatakan dirinya beserta anak buah lainnya diperintahkan AKBP Budi untuk mendukung Capres dan Cawapres 01, dirinya memang telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Polsek Pasirwangi dan dipindah-tugaskan menjadi Kepala Unit Seksi Pelanggaran Sub-direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Sulman berpendapat bahwa dirinya telah di mutasi atas pertimbangan politis, yakni karena berfoto dengan salah satu tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Capres dan Cawapres nomor urut 02 di Kecamatan Pasirwangi.

Dirangkum dari Kompas.com, pada tanggal 1 April 2019 sehari setelah AKP Sulman mengatakan bahwa Polri tidak netral di Pilpres 2019, Sulman akhirnya mencabut keterangannya yang sebelumnya menyebut bahwa Kapolres Garut memerintahkan Kapolsek bawahannya untuk memenangkan Jokowi - Ma'ruf. Sulman mencabut keterangannya di Mapolda Metro Jawa Barat. AKP Sulman mengaku pernyataan sebelumnya dilatarbelakangi emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria, AKP Sulman mengaku tidak terima dipindah tugas ke Mapolda Jawa Barat sebagai Kepala Unit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Sub-direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

Pada saat Pilpres berlangsung, masyarakat bebas menentukan pilihannya masing-masing. Namun, dalam penerapannya tidak semua warga negara dapat menggunakan hak politiknya. Misalnya saja anggota TNI dan Polri termasuk warga Negara yang dikecualikan dari hak politik tersebut. Hal ini bertujuan sebagai upaya memelihara dan menjaga sikap netralitas Institusi tersebut dalam proses pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan Presiden.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai kewajiban untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri juga dituntut untuk bekerja profesional serta dituntut mengedepankan netralitas dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, posisi Polri sebagai warga negara dan juga sebagai aparat penegak hukum menjadi jelas, terkait hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya. Netralitas tersebut juga telah diatur dalam Pasal 28 Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Jalannya Pemilu tidak bisa lepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia dalam tugasnya untuk menjaga rangkaian keamanan pada masa Pemilu berlangsung. Polri juga diminta oleh Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu) untuk menjaga netralitas selama masa Pemilu. Tugas Pokok Polri dalam Pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, untuk menegakan hukum, serta memberikan pelayanan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat.

Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Junaidi, 2009).

Kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri dalam masa Pilpres ini juga menjadi salah satu sorotan media massa. Keberadaan media massa menduduki posisi yang sangat strategis terutama dalam memberikan akses bagi mereka yang membutuhkan informasi. Manusia yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu, menganggap media dapat membantu dalam memberikan akses bagi orang-orang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, peran dan fungsi media pun semakin luas. Media tidak hanya berperan memberikan akses informasi, namun secara tidak sadar media dapat mempengaruhi opini publik dan menggiring persepsi masyarakat sesuai tujuannya.

Salah satu media *online* yang turut aktif melakukan pemberitaan mengenai kasus di atas adalah Kompas.com. Kompas.com merupakan media *online* yang memberikan sajian informasi aktual kepada para pembaca. Dalam situs resmi Kompas.com, dapat ditemukan *tagline* “Jernih Melihat Dunia”, dalam hal ini Kompas.com ingin mempromosikan diri sebagai media yang selalu menyajikan informasi dalam perspektif objektif, utuh, independen, tidak bias oleh berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik.

Alasan peneliti memilih pemberitaan yang ada di media *online* Kompas.com sebagai objek penelitian adalah peneliti ingin mengetahui sejauh mana Kompas.com dalam menyusun, membingkai dan menampilkan pemberitaan mengenai kasus di atas berdasarkan fakta yang ada. Peneliti juga ingin mengetahui apakah pemberitaan yang ditampilkan oleh Kompas.com mengenai kasus tersebut lebih menekankan kasus tersebut sebagai murni kasus hukum atau hal lainnya yang belum diketahui publik, mengingat Kompas.com dalam halaman *website* resmi nya mengedepankan visi objektif, independen dan tidak bias oleh berbagai kepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga penulis ingin menganalisis teks berita *online* Kompas.com mengenai kasus dugaan ketidaknetralan Polri dalam masa Pilpres 2019 dengan menggunakan analisis *framing* teks model Robert N. Entman yang kemudian dipadukan dengan teori konstruksi realitas sosial, analisis teks ini dilakukan karena peneliti ingin mencari tahu pembingkai Kompas.com dalam memberitakan kasus tersebut berdasarkan realita atau fakta yang ada, yang kemudian dipadukan dengan teori konstruksi realitas sosial untuk mencari tahu bagaimana media memaknai dan membingkai suatu peristiwa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Media Massa

Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat, digunakan untuk berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dan bertujuan mencari keuntungan (Mondry, 2008), sedangkan menurut Bungin (2008), media massa merupakan Institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Secara umum, media massa diartikan sebagai alat-alat komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada *audience* dalam jumlah yang luas dan heterogen (Nurudin, 2004).

Adapun jenis media massa antara lain media elektronik (radio, televisi), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, film dan internet (Bungin, 2008). Media massa dalam konteks jurnalistik pada dasarnya terbatas pada tiga jenis media, yaitu:

1. Media cetak, yang terdiri dari surat kabar, tabloid, majalah, buletin/jurnal dan sebagainya.
2. Media elektronik, yang terdiri dari radio dan televisi.
3. Media *online*, yaitu media *internet* seperti *website*, *blog* dan lain sebagainya (Yunus, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengupas permasalahan yang ada di salah satu jenis media massa, yaitu Kompas.com yang adalah media *online*.

### Media *Online* sebagai Media Baru (*New Media*)

Media baru ditandai dengan apa yang disebut konvergensi media. Secara struktural, konvergensi media berarti integrasi dari tiga aspek, yakni telekomunikasi, data komunikasi dan komunikasi massa dalam satu *medium*. Selain konvergensi media, kemunculan media interaktif merupakan karakteristik kedua dalam media baru. Khalayak di era media interaktif bisa menjadi konsumen dan saat itu juga bisa menjadi produsen dari informasi (Nasrullah, 2014).

Paul Levinson dalam bukunya *new-new media* menyebutkan ada beberapa layanan yang dapat dikategorikan dalam *new media* atau media *online*, salah satunya adalah *website* atau yang biasa dikenal sebagai situs *online*, Situs *online* adalah halaman yang merupakan satu alamat *domain* yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi hingga berisi tautan dari halaman *web* lainnya. Situs disesuaikan dengan jenis informasi yang akan disampaikan, seperti *www.kompas.com* merupakan situs portal berita *online* milik Kompas Gramedia Group

Dari pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa media *online* merupakan bagian dari *new media*, dimana pada saat ini media *online* kerap mengalami perkembangan teknologi yang sangat baik, hal ini menjadikan media *online* mempunyai fungsi dan peran yang luas bagi masyarakat, dengan perkembangan media *online* saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa media *online* akan menjadi sebuah andalan dalam pencarian informasi kedepannya.

Karena pada dasarnya masyarakat diberikan kebebasan untuk mencari berbagai informasi yang ada serta didukung oleh kemudahan perolehan informasi di media *online* itu sendiri.

## **Berita**

Berita (*news*) adalah sajian utama sebuah media massa di samping *views* (opini). Mencari bahan berita kemudian menyusunnya merupakan tugas pokok Wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (Romli, 2014). Michtel V. Charnley mengatakan “Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka” (Romli, 2014).

Oleh karena itu, dalam menulis berita harus memenuhi unsur-unsur berita dan menjadi “karakteristik utama” sebuah berita dapat dipublikasikan di media massa atau yang biasa disebut layak muat. Keempat unsur inilah yang dikenal dengan nilai-nilai berita (*news values*) atau nilai-nilai jurnalistik (Romli, 2014):

1. Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (*news*). “Tulisan jurnalistik,” kata Al Hester, “adalah tulisan yang memberi pembaca pemahaman atau informasi yang tidak ia ketahui sebelumnya”.
2. Nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta (*fact*), bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (*real event*), pendapat (*opinion*), dan pernyataan (*statement*) sumber berita.
3. Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.
4. Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, disamping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak juga berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita “human interest” (menyentuh emosi, menggugah perasaan) (Romli, 2014).

Secara ringkas dapat diambil kesimpulan bahwa berita merupakan laporan peristiwa yang telah memenuhi keempat unsur tersebut, karena tidak semua peristiwa yang terjadi layak dilaporkan atau diinformasikan. Dengan demikian seorang Wartawan hendaknya mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak mengandung unsur-unsur nilai berita (Romli, 2014).

## **Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut KBBI dalam *kbbi.web.id* Polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). Tugas pokok Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan *Swakarsa*.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Melaksanakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium *forensik* dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh Instansi dan pihak yang berwenang.
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Teori Konstruksi Realitas Sosial**

Menurut Bungin (2011) istilah konstruktivisme atau konstruksi atas realitas sosial terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul “ *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge tahun 1966* “.

Teori konstruksi sosial realitas berpandangan bahwa masyarakat yang memiliki kesamaan budaya akan memiliki pertukaran makna yang berlangsung terus-menerus. Secara umum, setiap hal akan memiliki makna yang sama bagi orang-orang yang

memiliki kultur yang sama. Tanda larangan berhenti di jalan, misalnya, memiliki makna yang akan sama bagi setiap orang. Berger dan Luckman menyebut tanda larangan itu memiliki simbol makna objektif karena orang kerap menginterpretasikan secara biasa-biasa saja. Namun, ada beberapa hal lain yang merupakan makna subjektif, hal ini disebut tanda. Dalam konstruksi realitas, mobil adalah lambang (simbol) mobilitas, namun mobil dengan merek - merek tertentu, seperti Cadillac atau Mercedes Benz merupakan tanda kemakmuran atau kesuksesan (Morissan & Wardhani, 2010).

Pada dasarnya, proses konstruksi realitas oleh media dapat dirangkum dalam enam perspektif. Menurut Eriyanto dalam Marcelina (2018) enam perspektif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fakta/Peristiwa Adalah Hasil Konstruksi

Bagi kaum konstruktivis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir karena diciptakan dan dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Pernyataan utama dalam pandangan konstruktivis adalah fakta berupa kenyataan itu sendiri. Pembacalah yang memberikan definisi dan menentukan fakta tersebut sebagai realitas.

2. Media Adalah Agen Konstruksi

Dalam pandangan konstruktivis, media bukanlah dianggap sebagai saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, dan pemihaknya. Media dipandang sebagai agen yang mengkonstruksi realitas. Maka berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, dan bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai *instrument* yang dimilikinya, media juga ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaannya.

3. Berita Bukan Refleksi dari Realitas, Ia Hanya Konstruksi atas Realitas

Menurut pandangan konstruktivis, berita merupakan hasil konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada fakta yang dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaannya selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan cerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena cara melihatnya yang berbeda.

4. Berita Bersifat Subjektif atas Realitas

Berita subjektif dari sisi lain wartawan. Karena wartawan sendiri melihat dengan perspektif dan berbagai pertimbangan subjektifnya. Penempatan sumber berita yang lebih ditonjolkan dari sumber lainnya, menempatkan Wartawan sebagai seorang tokoh yang lebih besar dari tokoh lainnya. Liputan yang hanya satu sisi tidak berimbang, misalnya, bagi kaum konstruktivis, hal tersebut bukanlah sebuah kekeliruan, tetapi dianggap memang demikianlah praktik yang disajikan oleh wartawan.

5. Wartawan Bukanlah Pelapor. Ia Konstruksi Realitas

Dalam pandangan konstruktivis, wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya. Karena ia merupakan bagian yang *intrinsik* dalam pembentukan berita. Lagi pula berita bukan hanya produk individual, melainkan juga bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawannya. Wartawan juga tidak hanya melaporkan peristiwa, melainkan juga turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. Dalam arti kata wartawan bukanlah pemulung yang netral dan mengambil fakta begitu saja.

6. Etika, Pilihan Moral dan Keberpihakan Wartawan Adalah Bagian Integral dalam Produksi Berita

Aspek etika, moral dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dalam pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya. Etika dan moral dalam banyak hal dapat berarti keberpihakan pada suatu kelompok atau integral yang tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas.

Berdasarkan keenam perspektif tersebut, pada dasarnya melihat bahwa pekerjaan media adalah sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan realitas. Realitas bukanlah sesuatu yang telah tersedia, yang tinggal diambil oleh wartawan. Sebaliknya, semua jurnalis pada dasarnya adalah agen, bagaimana peristiwa yang acak, kompleks, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah berita, maka wartawanlah yang mengurutkan, membuatnya teratur, menjadi dipahami dan memilih aktor-aktor yang diwawancarai sehingga membentuk sebuah berita yang dibaca khalayaknya.

### **Analisis *Framing* Robert N. Entman**

Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian *konstruksionis*. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Karenanya konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Pada kajian studi komunikasi, paradigma *konstruksionis* ini seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma *positivis* (Eriyanto, 2012)).

Ada dua aspek penting dalam *framing*. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan kepada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih *angel* tertentu, memilih fakta tertentu dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain (Eriyanto, 2012).



Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu penempatan yang menyolok, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi simplifikasi dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas.

Jadi, analisis *framing* merupakan analisis teks yang digunakan untuk mengkaji pembedaan realitas yang dilakukan media. Pembedaan tersebut merupakan proses konstruksi yang artinya realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Framing digunakan media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media.

Menurut Eriyanto dalam Fiorentina et al (2018), *framing* milik Robert N. Entman ini dibagi menjadi empat perangkat yaitu : *define problems* (pendefinisian masalah), yaitu bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa, *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat pilihan moral), yaitu nilai moral apa yang ingin disajikan dalam berita untuk melegitimasi sesuatu, dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian), yaitu penyelesaian apa yang ingin ditawarkan untuk mengatasi peristiwa atau konflik tersebut.

Apa yang diuraikan oleh Robert N. Entman di atas tersebut menggambarkan secara lebih jelas apa itu *framing*. Peristiwa yang sama juga bisa dimaknai secara berbeda oleh media. Dalam pendekatan ini media dianggap sebagai arena perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pokok persoalan wacana. Masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar diterima oleh khalayak.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. subjek dalam penelitian ini adalah portal berita *online* Kompas.com. Sedangkan yang menjadi objek adalah artikel pemberitaan terkait kasus dugaan ketidaknetralan Polri dalam masa Pilpres 2019 di situs portal berita *online* Kompas.com pada periode 30 Maret – 02 April 2019. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan bagian redaksi Kompas.com sedangkan dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan berita atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian berita tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis *framing* dari Robert N. Entman.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis atau juga biasa disebut paradigma konstruksionis (pertukaran makna). Paradigma ini menitikberatkan pada interaksi para pelaku sosial dalam suatu konteks tertentu. Dalam hal ini, para pelaku sosial atau partisipan terlibat dalam beberapa bentuk interaksi, yang

umumnya menggunakan bahasa dan atau tindakan sosial. Dalam transaksi itu, partisipan menegosiasikan sebuah makna. Makna ini tidak selalu berdasarkan bahasa, tetapi juga bisa sebuah produk tindakan sosial. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, kedua membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan ketiga yaitu tahapan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadi perbedaan.

## HASIL DAN DISKUSI

Hasil dari penelitian ini diawali dengan melakukan analisis pada pemberitaan mengenai dugaan kasus ketidaknetralan Institusi Polri di media *online* Kompas.com, dimana penulis menemukan bahwa artikel berita yang dimuat dalam portal berita tersebut cukup memperhatikan objektivitas, netralitas dan keberimbangan dalam pemberitaannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pemberitaan Kompas.com terkait kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri ini berusaha untuk mementingkan konfirmasi berdasarkan fakta perkembangan kasus yang ada, sehingga di sini terlihat Kompas.com berusaha memperhatikan objektivitas dalam setiap pemberitaannya.

Kompas.com juga terlihat cukup netral dalam pemberitaan yang dibuat terkait kasus ini, dalam hal ini netral diartikan karena Kompas.com terlihat tidak berpihak atau tidak ada tendensi berlebih ke salah satu pihak yang terkait dalam kasus ini, karena Kompas.com di sini hanya menampilkan berita *follow-up* mengenai perkembangan kasus tersebut.

Di sini peneliti juga melihat Kompas.com dalam menyajikan pemberitaannya mengenai kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Kepolisian dalam masa Pilpres 2019 cukup memperhatikan keberimbangan berita, hal ini dapat dilihat dari adanya pemilihan narasumber yang tidak cenderung menonjolkan salah satu pihak saja dalam pemberitaannya, Kompas.com berusaha mencari konfirmasi atau pernyataan narasumber yang dituding, tertuding, bahkan juga turut menyajikan atau memberikan ruang melalui pernyataan narasumber dari pihak lain yang terkait kasus ini, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kompas.com juga menyajikan pernyataan pihak Bawaslu & Erick Thohir yang dituangkan ke dalam berita.

Kompas.com turut memberitakan pernyataan Bawaslu, yang dalam kasus ini mempunyai peran sebagai pengawas Pemilu, dimana pada berita Bawaslu ini berisi mengenai pihak Bawaslu sebagaimana peran nya untuk mengawasi jalannya Pemilu ingin meminta klarifikasi kedua pihak, yaitu dari pihak yang menuding, AKP Sulman dan pihak yang tertuding, AKBP Budi Satria, sedangkan pada pernyataan Erick Thohir, dalam kasus ini Erick Thohir mempunyai peran sebagai Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, dimana di dalam berita tersebut berisi pernyataan Erick Thohir yang menyayangkan adanya drama di dalam Pemilu.

Pada dasarnya melihat bahwa pekerjaan media adalah sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan realitas. Realitas bukanlah sesuatu yang telah tersedia, yang tinggal diambil oleh wartawan. Sebaliknya, semua jurnalis pada dasarnya adalah agen, bagaimana peristiwa yang acak, kompleks, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah berita, maka wartawanlah yang mengurutkan, membuatnya teratur, menjadi dipahami dan memilih aktor-aktor yang diwawancarai sehingga membentuk sebuah berita yang dibaca khalayaknya (Eriyanto dalam Gorontiawan, 2017).

Konstruksi realitas media Kompas.com juga dipengaruhi oleh pemilihan narasumber dan kutipan pernyataan yang ada di pemberitaan, namun di sini tidak ada *framing* khusus yang ingin disampaikan Kompas.com untuk mempengaruhi konstruksi realitas sosial di masyarakat. Kompas.com hanya berusaha “menjernihkan” para pembaca atas isu yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat, bahkan Kompas.com juga turut menghimbau Polri untuk menjaga netralitas melalui pemberitaan pernyataan pihak Bawaslu. Kompas.com dalam hal ini juga menjalankan fungsi media sebagai pengawas pemerintahan.

Dari hasil pengamatan penulis, walau semua media *online* berusaha membuat pemberitaan secara cepat, namun di sini Kompas.com terlihat lebih mendahulukan kepentingan akurasi dan ketepatan informasi dalam setiap pemberitaanya.

Berita (*news*) adalah sajian utama sebuah media massa. Mencari bahan berita kemudian menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (Romli, 2014). Dalam hal ini Kompas.com telah menyusun dan mengangkat isu yang sedang hangat menjadi pembicaraan atau pertanyaan publik mengenai kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri dalam masa Pemilihan Presiden.

Dalam pembentukan konstruksi realitas, peneliti melihat dalam pemberitaan mengenai kasus ini, Kompas.com cenderung memandang dan memaknai bahwa kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri ini merupakan masalah yang terjadi di internal Kepolisian, sehingga melahirkan citra tersendiri bagi pihak Kepolisian setelah adanya kasus ini. Untuk itu Kompas.com dalam hal ini terlihat berusaha “menjernihkan” pembaca atas isu apa yang sedang menjadi pertanyaan atau pembahasan publik dengan menjawabnya melalui pemberitaan mengenai perkembangan kasus tersebut sesuai konfirmasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemberitaan yang ada di Kompas.com terkait kasus ini terlihat cukup memperhatikan objektivitas, netralitas dan keberimbangan berita, Kompas.com melihat sudut pandang kasus ini cenderung memberitakan fakta-fakta permasalahan yang ada di internal Kepolisian, sehingga dalam pemberitaannya memang berisi fakta-fakta mengenai perkembangan kasus yang menjadi isu di lapangan, dalam hal ini Kompas.com menampilkan judul dan isi berita sesuai fakta yang ada, dan tidak ada tendensi berlebih yang menyudutkan pihak-pihak tertentu termasuk pihak Kepolisian itu sendiri. Dalam hal ini Kompas.com juga merupakan salah satu media *online* yang

berani mengangkat pemberitaan mengenai masalah yang ada di Kepolisian, hal ini juga sesuai dengan peran dan fungsi media sebagai pengawas pemerintahan.

Dilihat dari teori paradigma konstruksionis, tidak ada *framing* khusus yang ingin disampaikan Kompas.com untuk mempengaruhi konstruksi realitas sosial di masyarakat. Media *online* Kompas.com hanya berusaha “menjernihkan” para pembaca atas isu / peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan / pertanyaan di masyarakat dengan menjawabnya melalui pemberitaan mengenai perkembangan kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri dalam masa Pilpres 2019 tersebut sesuai konfirmasi dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Hal ini juga sesuai dengan keinginan Kompas.com itu sendiri yang ingin memposisikan diri sebagai media yang selalu menyajikan informasi dalam perspektif yang objektif, utuh, independen, tidak bias oleh berbagai kepentingan.

Kompas.com, setidaknya tetap konsisten dengan memberikan pemberitaan yang kritis termasuk pada kasus dugaan ketidaknetralan Institusi Polri dalam masa Pilpres. Hal itu dikarenakan isu tersebut adalah isu yang menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengkomparasi dua atau lebih portal media online, agar hasil yang diperoleh lebih valid dalam melihat isu atau permasalahan yang berkembang di masyarakat.

## REFERENSI

- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*: Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Eriyanto. (2012). *Anlisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS..
- Fiorentina et al. (2018). *Analisis framing Pemberitaan "Reuni Akbar 212" (Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online Kompas.com dengan Republika.co.id Edisi 26 November - 9 Desember 2017)*. Jurnal Politikom Indonesia. Vol 3 (2)
- Gorontiwani, Andy. (2017). *Analisis Framing Pemberitaan atas Gagalnya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di Tribunnews.com Periode Februari 2017*. Thesis. Stikosa AWS
- Junaidi, V. (2009). *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)*. Jurnal Konstitusi, 6(3).
- Marcelina, Cinthia. (2018). *Konstruksi Pemberitaan Media Online dalam Polemik Pengakuan Antasari Azhar (Analisis Framing Situs Berita Sindonews.com Pemberitaan Antasari Azhar Edisi 14 Februari - 16 Februari 2017)*. Thesis. Universitas Islam Riau
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

- Mondry. (2008). *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Morissan, M. ., & Wardhani, A. C. (2010). *Teori Komunikasi Massa* (F. Hamid (ed.)). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana, 2014
- Nurudin. (2004). *Komunikasi Massa*. Malang: Cespur.
- Romli, Asep Syamsul M. (2014). *Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung : Nuansa Cendikia.
- Wismabrata, M. H. (2019). *5 Fakta Kasus Mantan Kapolsek Tuding Kapolres Garut Tidak Netral di Pemilu, Cabut Pernyataan hingga Emosi karena Pindah Tugas*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/02/18130371/5-fakta-kasus-mantan-kapolsek-tuding-kapolres-garut-tidak-netral-di-pemilu>
- Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.